

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan suatu perusahaan adalah salah satu informasi dasar yang dapat digunakan oleh para investor dalam mempertimbangkan akan melakukan investasi pada suatu perusahaan atau tidak. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018), laporan keuangan dideskripsikan sebagai suatu penyajian informasi secara terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi keuangan, baik terkait posisi keuangan, arus kas, serta kinerja keuangan dari suatu perusahaan yang nantinya akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan terkait dalam membuat keputusan ekonomi (IAI, 2018). Ini menjelaskan bahwa pentingnya dari penyajian laporan keuangan oleh suatu perusahaan secara baik, benar serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan karena dari laporan keuangan tersebutlah publik dapat menilai bagaimana kondisi perusahaan saat ini. Laporan keuangan akan disajikan secara berkala pada setiap akhir periode.

Penyajian secara berkala ini juga sesuai dengan peraturan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan mempunyai kewajiban dalam memberikan laporan tahunan mereka kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 4 (empat) setelah tahun buku berakhir (OJK, 2016). Tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah untuk menunjukkan kinerja, serta kemampuan yang dimiliki perusahaan pada para pemakai laporan keuangan. Hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan mereka. Padahal, sudah jelas jika perusahaan melakukan *restatement* pada laporan keuangan mereka, ini dapat menimbulkan persepsi negatif dari pengguna laporan keuangan. Timbulnya persepsi negatif inilah yang dapat mempengaruhi pemakai laporan

keuangan ketika membuat keputusan mereka pada proses kegiatan bisnis dengan perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25 mendefinisikan *restatement* atau penyajian kembali sebagai penyajian ulang secara retrospektif yang berupa koreksi perubahan, baik dari pengukuran, pengakuan, maupun pengungkapan dari setiap unsur-unsur laporan keuangan pada periode sebelumnya dengan tujuan agar perubahan atau kesalahan pada laporan keuangan periode sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi (IAI, 2018). Ketika kesalahan dalam penyajian laporan keuangan ditemukan, perusahaan harus dengan sigap memberitahu dan memperingatkan kepada para investor untuk tidak lagi menggunakan laporan keuangan yang sebelumnya telah diterbitkan dikarenakan sudah tidak bisa diandalkan lagi dan perlu dilakukan peninjauan kembali dengan melakukan *restatement* (Ramadhanti dan Suryani, 2020). Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *financial report restatement*, perusahaan membutuhkan dan wajib mematuhi penerapan yang ada pada setiap perusahaan, yaitu *Good Corporate Governance*.

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang pernah mengalami *financial report restatement*, salah satunya adalah PT. Garuda Indonesia. PT. Garuda Indonesia melakukan *financial report restatement* pada tahun 2018, yang awalnya PT. Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar US\$5 juta atau sebesar Rp 699,9 miliar. Hal ini terjadi karena adanya dua komisaris dari pihak Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang keberatan untuk menandatangani laporan keuangan 2018 tersebut. Menurut Sidik (2019) *restatement* ini menindaklanjuti temuan kegagalan dalam laporan keuangan maskapai pelat merah tersebut terkait transaksi pada Mahata Aero Teknologi sebagai rekan penyedia manufaktur WiFi pada pesawat sebesar US\$ 239 juta yang diakui menjadi pendapatan. Pada posisi ini, belum ada pelunasan yang diterima dari Mahata sampai akhir tahun 2018 (Pratiwi, 2019). Dari keterjadian *financial report restatement* ini, timbul efek negatif dari publik maupun pemegang kepentingan, yaitu timbulnya tanggapan pada perusahaan yang memiliki kinerja tidak baik dikarenakan adanya

kelemahan dari sistem *Corporate Governance* dalam perusahaan dalam mengawasi penyajian pada laporan keuangan perusahaan.

*Restatement* lazimnya dijelaskan sebagai revisi pada laporan keuangan dikarenakan tak sesuai pada prinsip akuntansi yang berlaku (Widyaningrum, 2015). Adanya *financial report restatement* dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pengawasan di dalam penyusunan laporan keuangan. Adanya *restatement* juga dapat menunjukkan adanya konflik keagenan. Berdasarkan pada Teori Keagenan, konflik keagenan dapat terjadi karena minimnya pengawasan yang dapat menyebabkan informasi yang diberikan oleh agen kepada pihak prinsipal tidak lengkap. Oleh timbulnya informasi yang tidak cukup oleh pihak prinsipal tentang kegiatan agen, maka hal ini dapat memotivasi pihak agen untuk memberikan informasi keuangan yang tidak actual kepada pihak prinsipal (Siregar dan Rahayu, 2018).

*Good Corporate Governace* atau tata kelola perusahaan yang baik sangat penting diterapkan di dalam perusahaan. *Corporate Governance* adalah hubungan yang dideskripsikan oleh proses dan struktur. Contoh dari *Corporate Governance* adalah relasi di antara pemegang saham (penyedia modal), manajemen perusahaan, serta pemangku kepentingan. Dari relasi di antara mereka ini, pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan berbagi kepentingan bersama dalam meningkatkan tingkat *return* dari investasi oleh pemegang saham (International Finance Corporation, 2018:27). Bagi perusahaan publik, adanya mekanisme *Corporate Governace* yang baik dapat menjaga kepentingan dari para pemegang saham di dalam perusahaan. Tujuan dari *Corporate Governance* adalah sebagai alat untuk mendisiplinkan, mengawasi, serta untuk mengatur terkait wewenang yang dimiliki oleh masing-masing pihak di dalam perusahaan, seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta pemegang saham agar mereka mampu mengerti secara baik terkait peranan, fungsi, serta tanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan dengan baik sehingga dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pihak prinsipal (International Finance Corporation, 2018:28). *Good Corporate Governance* memiliki peran yang penting dalam pencegahan terjadinya kesalahan saji dan pengungkapan pada laporan keuangan, yaitu dengan memastikan bahwa

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dilakukan tepat waktu dan akurat pada semua aspek yang material mengenai korporasi, yaitu termasuk kinerja, kepemilikan, kondisi keuangan dan tata kelola suatu perusahaan (Siregar dan Rahayu, 2018). Menurut Widyaningrum (2015) adanya keterjadian *financial report restatement* dalam perusahaan secara tidak langsung menunjukkan adanya tindakan manipulasi ataupun terjadinya kesalahan saji pada laporan keuangan disebabkan informasi yang salah, dan nantinya dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Dengan adanya keterjadian ini, maka dapat mencerminkan bahwa terdapat kelemahan dalam menerapkan mekanisme *Good Corporate Governace* pada perusahaan dalam mengawasi serta menyusun laporan keuangan.

Penerapan *Good Corporate Governace* di dalam perusahaan yang lemah dapat dilihat ketika terjadi benturan kepentingan atau tidak adanya pengawasan dalam penyajian laporan keuangan. Menurut teori keagenan oleh Jensen dan Meckling (1976), saat pihak prinsipal memberikan kewenangan kepada pihak agen dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pihak agen, ada kemungkinan terjadinya pihak agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pihak prinsipal karena terdapat perbedaan kepentingan. Selain itu, adanya pengawasan yang lemah dalam penyajian laporan keuangan, dapat menimbulkan meningkatnya perilaku oportunitis dari pihak manajemen dan memungkinkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan karena pihak manajemen akan mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan dari pemegang saham, sehingga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan oleh para investor pada perusahaan serta jatuhnya harapan para investor terhadap pengembalian atas investasi yang mereka tanamkan dan nantinya dapat menyebabkan harga saham dan pasar modal tidak dapat berkembang. Hal ini juga lah yang dapat memicu perusahaan untuk melakukan *financial report restatement* ketika ditemukan adanya kesalahan saji yang tidak terdeteksi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat disebabkan karena adanya asimetris informasi ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi akibat adanya benturan kepentingan di dalam perusahaan. Laporan keuangan yang terdapat kesalahan saji karena lemahnya pengawasan

ataupun laporan keuangan yang telah disajikan dengan sebegus mungkin melalui tindakan manipulasi informasi keuangan ini nantinya akan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan dan akhirnya laporan keuangan harus disajikan kembali karena informasi keuangan yang disajikan sudah tidak relevan lagi (Kusumo, 2014). *Financial Report Restatement* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Dewan Komisaris Independen (Siregar dan Rahayu, 2018; Ramadhanti dan Suryani, 2020), Ukuran Komite Audit (Siregar dan Rahayu, 2018; Chandra, 2020), dan Kepemilikan Institusional (Siregar dan Rahayu, 2018; Saputra dan Kesumaningrum, 2017).

Faktor pertama yang mempengaruhi *financial report restatement* adalah Dewan Komisaris. Berdasarkan pernyataan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan dapat menyampaikan nasihat kepada direksi (OJK, 2014). Dalam Dewan Komisaris, terdapat anggota yang disebut dengan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan anggota yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik serta memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2014). Adanya pengawasan dari Komisaris Independen dapat mencegah kemungkinan dari terjadinya *financial report restatement*. Hal ini dikarenakan independensi dari anggota dewan komisaris yang mencegah adanya gangguan gangguan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga mampu meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan serta mengurangi kemungkinan terjadinya *financial report restatement* (Siregar dan Rahayu, 2018). Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *financial report restatement*. Sedangkan, penelitian dari Ramadhanti dan Suryani (2020) menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *financial report restatement*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *financial report restatement* adalah Ukuran Komite Audit. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

55/POJK.04/2015 Komite audit didefinisikan sebagai anggota komite yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, serta diketuai oleh Komisaris Independen dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (OJK, 2015). Komite audit yang memiliki anggota independen dianggap dapat menekan konflik keagenan yang timbul di perusahaan dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak akan mendapat intervensi dari pihak tertentu, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencegah *financial report restatement* (Chandra, 2020). Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Siregar dan Rahayu (2018) memperlihatkan bahwa Komite Audit yang diproksikan dengan Ukuran Komite Audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *financial report restatement*. Sedangkan, penelitian dari Chandra (2020) menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit positif terhadap *financial report restatement*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *financial report restatement* adalah Kepemilikan Institusional. Menurut Siregar dan Rahayu (2018) Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, dan institusi berbadan hukum. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lebih optimal dikarenakan keputusan yang akan diambil oleh manajemen akan berdampak secara langsung pada kekayaan pemegang saham. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap *financial report restatement*, ini dikarenakan adanya investor institusional yang dianggap dapat mengurangi kecenderungan dari pihak manajemen untuk melakukan kegiatan yang mementingkan kepentingan dari pihak manajemen itu sendiri dengan cara melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Soegiharto, 2020). Investor institusional adalah investor yang aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap manajemen, ini dilakukan karena investor institusional pada umumnya memiliki saham untuk jangka panjang (Siregar dan Rahayu, 2018). Hasil studi empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar dan Rahayu (2018) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *financial report restatement*. Sedangkan, penelitian dari Saputra dan Kesumaningrum (2017)

menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap *financial report restatement*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten antara penelitian satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pada metode pengukuran masing-masing variabel dan sampel. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2020) menggunakan sampel perusahaan yang melakukan *financial restatement*, namun tidak diidentifikasi dan diklasifikasikan lebih lanjut mengenai faktor penyebab terjadinya *financial restatement*. *Restatement* yang timbul karena adanya penerapan PSAK yang baru, adanya perubahan metode akuntansi yang baru, proses akuisisi yang telah sesuai dengan PSAK, serta adanya *stock splits* tidak akan digunakan sebagai sampel penelitian dikarenakan faktor-faktor tersebut tidak menunjukkan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan tidak mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan suatu perusahaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen. Variabel-variabel dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya. Kemudian pada penelitian ini menggunakan data terbaru untuk menguji dan meneliti pengaruh dari mekanisme *Corporate Governance* terhadap *financial report restatement*, yaitu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019.

Berdasarkan dari latar belakang, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh dari beberapa faktor-faktor dari mekanisme *Corporate Governance* terhadap kemungkinan terjadinya *Financial Report Restatement*, yaitu: Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit serta Kepemilikan Institusional. Dalam penelitian ini, penelitian juga menggunakan variabel kontrol berupa Ukuran Perusahaan. Pada penelitian ini, perusahaan yang akan digunakan sebagai objek penelitian adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki risiko yang lebih besar karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki transaksi dan akun yang cukup kompleks dalam kegiatan bisnis perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur dianggap sangat rentan terhadap salah saji dalam laporan keuangannya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap *Financial Report Restatement*?
2. Apakah Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *Financial Report Restatement*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap *Financial Report Restatement*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis secara empiris berhubungan dengan:

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Financial Report Restatement*.
2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Financial Report Restatement*.
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Financial Report Restatement*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan yang telah ada dan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait dengan pengaruh Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Financial Report Restatement*.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemakai laporan, yaitu pihak internal seperti pemilik, manajemen perusahaan, dan pihak eksternal seperti investor, pelanggan, serta masyarakat umum untuk mengetahui pengaruh dari Dewan Komisaris Independen,



Ukuran Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional pada *Financial Report Restatement*, sehingga mampu membantu pihak yang berkaitan dalam proses pengambilan keputusan.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini berpedoman pada 5 (lima) yang saling berhubungan, yaitu:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diisi dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan memberikan penjelasan tentang landasan teori penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkaji informasi, serta model analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan memberikan penjelasan tentang desain penelitian, definisi operasional variabel penelitian yang akan digunakan, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum dari objek penelitian yang digunakan, deskripsi dari hasil analisis pembahasan objek penelitian, hasil dari proses pengolahan data yang telah dilakukan, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis.

#### **BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada saat melakukan penelitian, dan saran yang akan diberikan untuk peneliti dan pihak yang berkepentingan, serta bagi penelitian berikutnya.